

## Dampak perlakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap bidang usaha minyak dan gas bumi setelah berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi

Toto Hari Saputra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20270003&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Tesis ini, membahas mengenai dampak perlakuan perpajakan dan kepabeanan terhadap bidang usaha minyak dan gas bumi, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Badan Pelaksana Migas dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu terlebih dahulu memahami ketentuan-ketentuan terkait antara lain ketentuan di bidang pajak dan kepabeanan, kehutanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya sehingga penyusunan kontrak di bidang migas lebih seimbang dengan IJU Migas dan peraturan perundangan lain yang terkait. Pentingnya kontrak di bidang migas terkandung unsur penguasaan hajat hidup orang banyak, berjangka waktu lama,

dan berpengaruh pada keuangan negara dalam jangka panjang. Pemerintah perlu membentuk suatu tim yang solid (bersifat ad hoc ataupun antar departemen) dengan melibatkan unit-unit terkait guna mengkaji secara komprehensif (baik dari aspek penerimaan migas, pajak, kehutanan, lingkungan hidup dan sebagainya) kebijakan di bidang usaha migas dalam rangka menyusun kontrak baku di bidang migas dengan tetap memperhatikan hal kebijakan ekonomi yang akan ditempuh, kepastian hukum serta memberikan profit bagi negara dan menarik bagi investor.

.....The focus of this study is the impact of the taxation and custom regulation to the oil and gas industry in Indonesia, since effectiveness of the Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (Law No. 22 of 2001) dated of November 23, 2001. This research is qualitative descriptive interpretive. The researcher suggests that Badan Pelaksana Migas and the Ministry of Energy and Mineral Resources need to understand to the taxation and custom regulation, forestry regulation, environment regulation, and other relating regulation, in order to draft oil and gas standard contract under the Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (Law No. 22 of 2001) and other relating regulation. Further, considering that oil and gas contract have a wide impact to the public priority and state's finance, Government requires to build a team to research oil and gas policy in order to draft oil and gas standard contract that give advantage to